

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS SETELAH LULUS UJIAN TESIS

NAMA : OKTAVIA ROSIANA KURNIAWAN
NIM : 127151005
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA)

TANGGAL : 20 Desember 2017

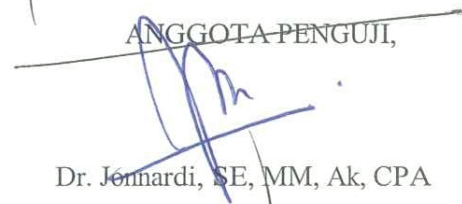
KETUA PENGUJI,



Prof. Dr. Nizam Jim Wiryawan, MM

TANGGAL : 20 Desember 2017

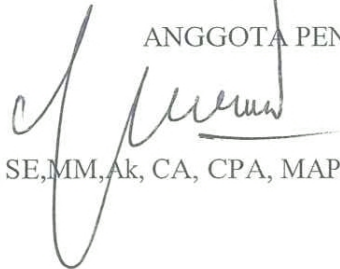
ANGGOTA PENGUJI,



Dr. Jonnardi, SE, MM, Ak, CPA

TANGGAL : 20 Desember 2017

ANGGOTA PENGUJI,



Dr. Herman Ruslim, SE, MM, Ak, CA, CPA, MAPPI (Cert)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara:

Nama : Oktavia Rosiana Kurniawan
NIM : 127151005
Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul:

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA).

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, Desember 2017
Yang membuat pernyataan,



Oktavia Rosiana Kurniawan

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : OKTAVIA ROSIANA KURNIAWAN
NO. MAHASISWA : 127151005
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI EMPIRIS TERHADAP WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI DKI JAKARTA)

Jakarta, Desember 2017

Pembimbing,



Dr. Jemardi, SE, MM, Ak., BAP

Determinants of Tax Compliance Behaviour
(Empirical Study of Individual Taxpayers in DKI Jakarta)

Oktavia Kurniawan

Abstract

Tax revenues are major and important income sources for governments in most countries. Sufficient tax revenues make many government projects possible and help elected officials and politicians to remain in office longer if the government implements programs and projects demanded by the public. In today's globalizing economic environments, there is increasing demand for a variety of public services and programs. However, the rate of increase in the tax revenues to finance these public services and programs falls short of the necessary public spending. The potential tax revenue of a country based on its legal or tax law is much larger than the tax revenues that are actually collected. Due to the lack of full tax compliance, government budgets are rarely balanced in most countries, and the gap between revenue and spending is increasing. The main question is why individual taxpayers non-compliance. To understand tax evasion, one can examine what factors cause taxpayers to evade taxes. If factors that affect tax evasion are identified, policies can be developed to prevent tax evasion.

The purpose of this study is to analyze factors of investigate factors related to individual tax compliance behavior using tax payers attitude, subjective norm, tax law fairness and tax sanctions. The population of this study is an individual taxpayer in DKI Jakarta. Technique used in taking samples in this study is simple purposive sampling with 100 questionnaire. The data processing used SEM PLS.

The results show that tax payers attitude, subjective norm and tax law fairness have positive and significant effects toward tax compliance behavior but tax sanctions have positive effect and not significant effect to tax compliance behavior.

Key words: Tax compliance, Tax Payers Attitude, Subjective Norm, Tax Law Fairness, Tax Sanctions.

**Faktor – Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta)**

Oktavia Kurniawan

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama dan penting bagi pemerintah di sebagian besar negara. Penerimaan pajak yang memadai membuat banyak proyek pemerintah memungkinkan dan membantu pejabat terpilih dan politisi untuk tetap berkuasa lebih lama jika pemerintah menerapkan program dan proyek yang diminta oleh publik. Dalam lingkungan ekonomi global saat ini, ada peningkatan permintaan untuk berbagai layanan dan program publik. Namun, tingkat kenaikan pendapatan pajak untuk membiayai layanan publik dan program ini tidak sesuai dengan pengeluaran publik yang diperlukan. Penerimaan pajak potensial suatu negara berdasarkan undang-undang hukum atau pajaknya jauh lebih besar daripada penerimaan pajak yang benar-benar dikumpulkan. Karena kurangnya kepatuhan pajak penuh, anggaran pemerintah jarang diimbangi di kebanyakan negara, dan kesenjangan antara pendapatan dan belanja meningkat. Pertanyaan utamanya adalah mengapa wajib pajak orang pribadi tidak patuh. Untuk memahami penghindaran pajak, seseorang dapat memeriksa faktor-faktor apa yang menyebabkan pembayar pajak menghindari pajak. Jika faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak teridentifikasi, kebijakan dapat dikembangkan untuk mencegah penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyelidiki faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak individu dengan menggunakan sikap wajib pajak, norma subjektif, keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak individu di DKI Jakarta. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple purposive sampling* dengan 100 kuesioner. Pengolahan data menggunakan SEM PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, norma subjektif dan keadilan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak namun sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Kata kunci: Perilaku Kepatuhan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Norma Subyektif, Keadilan Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mendalam Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih yang besar akhirnya Saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tesis yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta”**. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta) ini Saya susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Magister pada Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara.

Selama proses penyusunan tesis ini, Saya mendapat dukungan, bantuan, bimbingan serta Doa dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, Saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Iswan Kurniawan dan Ibunda tersayang Nik, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada Saya.
2. Bapak Dr. Jonnardi, drs, MM, Ak. BAP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Bapak Dr. Herman Ruslim, SE., MM., Ak., CA., CPA., MAPPI (Cert) selaku ketua jurusan dan dosen yang mendidik Saya dalam beberapa mata kuliah.
5. Bapak Dr. Jonathan Sarwono yang sangat sabar membantu dan memberikan pengetahuan ilmu untuk pengolahan data tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik Saya semenjak awal semester hingga akhir semester.
7. Bapak Nyoman Maharsa yang sejak awal Saya mendaftar selalu tidak lupa dengan ucapan “Semoga Sukses”.
8. Teman-teman sekelas yang sangat baik dan selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Saya berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Saya sendiri, para pembaca, dan rekan-rekan yang hendak melakukan penelitian berikutnya.

Jakarta, Desember 2017

Penulis,

Oktavia Rosiana Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Tujuan	9
1.5.2 Manfaat	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.2 Definisi Konseptual Variabel.....	12
2.1.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.1.1.1 <i>Theory of Reasoned Actions</i>	12
2.1.1.2 <i>The Theory of Planned Behavior</i>	17
2.1.2 <i>Middle Theory</i>	20
2.1.2.1 Teori Atribusi	21
2.1.2.2 Teori Pemajakan	22

2.1.3 <i>Applied Theory</i>	26
2.1.3.1 Kepatuhan Pajak	26
2.1.3.2 Sikap Wajib Pajak	29
2.1.3.3 Norma Subyektif	30
2.1.3.4 Keadilan Sistem Perpajakan	31
2.1.3.5 Sanksi Perpajakan	35
2.2 Hubungan Antar Variabel	36
2.2.1 Sikap Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak	36
2.2.2 Norma subyektif terhadap perilaku kepatuhan pajak	37
2.2.3 Keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak	38
2.2.4 Sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak	40
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	56
3.2 Populasi dan teknik pemilihan sampel	59
3.3 Operasionalisasi variabel dan instrumen	61
3.4 Analisis Data	67
3.4.1 Analisis Validitas dan Reliabilitas Kuesioner	68
1. Analisis Validitas	68
2. Analisis Reliabilitas	68
3.4.2 Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	68
1. Uji Validitas	69
a. <i>Convergent Validity</i>	69
b. <i>Discriminant Validity</i>	69
2. Uji Reliabilitas	71
3. Uji Signifikansi	72

3.5 Teknik Analisis Data	72
3.5.1 Persamaan Pengukuran <i>Outer Model</i>	76
3.5.2 Persamaan Pengukuran <i>Inner Model</i>	78
3.5.3 Persamaan Hipotesis	78

BAB IV Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Unit Observasi	79
4.2 Hasil Uji Reliabilitas Dan Validitas Kuesioener	80
4.2.1 Uji Reliabilitas Kuesioner	80
4.2.2 Uji Validitas Kuesioner	84
4.3 Karakteristik Responden	88
4.4 Statistik Deskriptif	90
4.5 Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)	93
4.5.1. Hasil Uji Validitas	93
a. Validitas Indikator Konstruk Sikap Wajib Pajak	93
b. Validitas Indikator Konstruk Norma Subyektif	96
c. Validitas Indikator Konstruk Keadilan Sistem Perpajakan	98
d. Validitas Indikator Konstruk Sanksi Perpajakan	100
e. Validitas Indikator Konstruk Tingkat Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	101
4.5.2. Hasil Uji Reliabilitas	109
a. Reliabilitas setiap konstuk Eksogen dan Konstruk Endogen.....	109
4.5.3. Hasil Uji Signifikansi	110
a. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak ..	110
b. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Norma Subyektif	111
c. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan	113
d. Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan ...	114

e. Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	115
4.5.4 Analisa Analisa Persamaan Model Pengaruh (<i>Outer Model</i>)	116
a. Variabel Sikap Wajib Pajak (ξ_1)	116
b. Variabel Norma Subyektif (ξ_2)	119
c. Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (ξ_3)	121
d. Variabel Sanksi Perpajakan (ξ_4)	123
e. Variabel Perilaku Kepatuhan Pajak (η_1)	124
4.6 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	126
a. Analisa Pengaruh Antar Konstruk.....	126
b. Variabilitas Model Penelitian	129
c. Analisa Persamaan Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	133
d. Analisa Hipotesis Penelitian	134

BAB V Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan	142
5.2 Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016.....	3
Tabel 2.1	Matriks Hasil Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1	Tabel Operasionalisasi Variabel	65
Tabel 3.2	Skala Likert.....	66
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner	79
Tabel 4.2	Peincian Pembagian Kuesioner Wajib Pajak Orang Pribadi	80
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak.....	81
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Konstruk Eksogen Norma Subyektif.....	82
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan.....	83
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan	83
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	84
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Kuesioner Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak.....	85
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Kuesioner Konstruk Eksogen Norma Subyektif.....	86
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Kuesioner Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan.....	86

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kuesioner Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan	87
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kuesioner Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	88
Tabel 4.13 Data Jenis Kelamin Responden	89
Tabel 4.14 Data Usia Responden	89
Tabel 4.15 Tingkat Pendidikan Responden	90
Tabel 4.16 Statistik Deskriptif	90
Tabel 4.17 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak.....	94
Tabel 4.18 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak	95
Tabel 4.19 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Norma Subyektif	96
Tabel 4.20 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Norma Subyektif	97
Tabel 4.21 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan.....	98
Tabel 4.22 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan	99
Tabel 4.23 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan.....	101
Tabel 4.24 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan.....	102
Tabel 4.25 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	103
Tabel 4.26 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	104
Tabel 4.27 Nilai <i>AVE</i> dan \sqrt{AVE} setiap konstruk	105
Tabel 4.28 Perbandingan \sqrt{AVE} Seluruh Konstruk dengan Nilai Korelasi Konstruk	106
Tabel 4.29 Hasil Uji Reliabilitas	109

Tabel 4.30	Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak.....	111
Tabel 4.31	Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Norma Subyektif	112
Tabel 4.32	Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan	113
Tabel 4.33	Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan	114
Tabel 4.34	Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak	116
Tabel 4.35	Nilai <i>Path Coefficient</i>	126
Tabel 4.36	Nilai R-square (R ²).....	130
Tabel 4.37	Effect Size	131
Tabel 4.38	Q ² Value.....	133
Tabel 4.39	Tabel Pengujian Hipotesis.....	135
Tabel 4.40	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Penelitian Sebelumnya	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>ASEAN Tax Ratio</i>	2
Gambar 2.1	<i>Theory of Reason Action (TRA)</i>	13
Gambar 2.2	<i>The Theory of Planned Behavior</i>	19
Gambar 2.3	Model Penelitian	55
Gambar 3.1	Model Pengukuran	58
Gambar 3.2	Kerangka Pemikiran	74
Gambar 4.1	Diagram Jalur Model Penelitian.....	93
Gambar 4.2	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak	94
Gambar 4.3	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Norma Subyektif.....	96
Gambar 4.4	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan	98
Gambar 4.5	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan	100
Gambar 4.6	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Perilaku Kepatuhan Pajak .	103
Gambar 4.7	<i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen dan Endogen	109
Gambar 4.8	Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sikap Wajib Pajak.....	110
Gambar 4.9	Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Norma Subyektif	112
Gambar 4.10	Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Keadilan Sistem Perpajakan.....	113
Gambar 4.11	Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Sanksi Perpajakan.....	114
Gambar 4.12	Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Perilaku Kepatuhan Pajak.....	115
Gambar 4.13	<i>Path Coefficient</i>	128
Gambar 4.14	Hasil <i>PLS Algorithm</i>	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Data Jawaban Responden

Lampiran 3 Diagram Jalur Model Penelitian (*Output SmartPLS3*)

Lampiran 4 Tabel t

Lampiran 5 Diagram Hasil Uji Validitas (*Output SmartPLS3*)

Lampiran 6 Diagram Hasil Uji Signifikansi (*Output SmartPLS3*)

Lampiran 7 Tabel r

BAB I

PENDAHULUAN

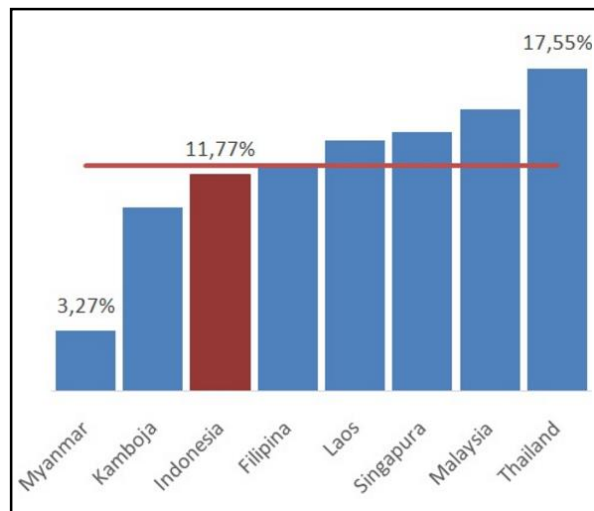
1.1.Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan aspek fundamental dalam kehidupan moderen. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi dunia telah membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi dan sosial penduduk dunia. Suatu negara membutuhkan dana untuk mendanai pelayanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang baik dan murah bagi warga negara, pembangunan fasilitas-fasilitas kepentingan publik dan infrastruktur disamping untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti gaji pegawai negeri dan pembayaran hutang dan bunga pinjaman luar negeri. Dimasa pemerintahan era Presiden Ir. Joko Widodo saat ini dimana sangat mengedepankan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok tanah air yang dianggap sebagai roda utama penggerak ekonomi rakyat, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan.

Fenomena perpajakan di Indonesia adalah sebagian besar warga Indonesia, terutama orang kaya atau orang berpenghasilan menengah belum patuh membayar pajak. Masih besarnya potensi pajak ini juga diakui oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Beliau mengatakan pendapatan pajak selama sepuluh tahun belakangan hanya naik rata-rata 0,1% per tahun. Sejak 2011 hingga 2016, penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Menurut Presiden, perbandingan antara penerimaan pajak yang berhasil dipungut dengan potensi yang tersedia (*tax coverage ratio*) saat ini baru 53%.

Di sisi lain, *tax ratio* Indonesia tahun 2016 adalah terendah ketiga se-ASEAN

yakni hanya 11,77 % jika dibandingkan dengan Malaysia 16,1%, Singapura 14%, dan Thailand 17,55%.



GAMBAR 1.1

ASEAN Tax Ratio

(**Sumber:** <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/>. Gambar 3Tax ratio Negara-Negara /Asia Tenggara, diakses tanggal 1 Juni 2017).

Rendahnya tax ratio Indonesia mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor SE-06/PJ/2017 mengenai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penetapan target rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2017 dengan maksud mendorong pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian Surat Pembertahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) terutama WP Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan. Pada tanggal 23 Januari 2017 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor : PER-01/PJ/2017 tentang penyampian SPT melalui elektronik menggantikan PER-03/PJ/2015 dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fakta lain menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak turun dari tahun ke tahun. Menurut data yang diperoleh dari laporan kinerja DJP tahun 2016 persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2016 adalah yang terendah dalam 4 tahun terakhir yakni 81,60%. Data target dan realisasi penerimaan pajak antara tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

TABEL 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016

(dalam triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Tahun	Δ 2013-2014	Δ 2014-2015	Δ 2015-2016
Growth	6,92	7,68	4,24

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016>, diakses tanggal 1 Juni 2017).

Fakta belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan Wajib

Pajak tidak melaporkan SPT, *under-reporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya dan *under-payment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Menurut Nickerson, et al (2009) Penduduk harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk meningkatkan pemenuhan keperluan hidupnya.

Bukti empiris terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak hasilnya belum konsisten. Pertama, bahwa usia bisnis, kewajiban pajak dan kompleksitas pelaporan pajak secara konsisten mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak pada bagian: lebih rendah melaporkan pendapatan, terlalu tinggi melaporkan biaya dan ketidakpatuhan secara keseluruhan. Tidak demikian dengan biaya kepatuhan pajak memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak (Noor, dkk, 2014). Kedua, bahwa faktor-faktor non ekonomi seperti pendidikan, sumber pendapatan, keadilan pajak dan *tax morale* memiliki dampak yang kuat terhadap *tax evasion* (Richardson, 2006). Ketiga, secara global *tax compliance* (kepatuhan pajak) berhubungan positif dengan tingkat kebebasan ekonomi, pasar ekuitas dan efektifitas hukum bisnis dan berhubungan negatif dengan tingkat kejahatan sebagai tolak ukur norma moral (Belkaoui, 2004).

Dalam penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yang akan diuraikan

lebih lanjut. Faktor-faktor tersebut diantaranya sikap wajib pajak, norma subyektif, keadilan sistem pajak dan sanksi perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku dan sikap dapat dipengaruhi oleh situasi. Situasi yang mendukung atau positif akan menunjukkan niat patuh yang tinggi pula. Semakin tinggi atau positif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan berbanding lurus dengan niat untuk berperilaku patuh (Anjani & Restuti, 2016).

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah norma subyektif. Norma subyektif dapat diartikan merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya mendukung perilaku tersebut dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Keinginan seseorang terhadap suatu obyek akan timbul atau perilaku jika orang tersebut akan terpengaruh oleh orang-orang disekitarnya atau seseorang meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang di sekitarnya mendukung terhadap apa yang dilakukannya. Secara empiris norma subyektif (*subjective norm*) positif signifikan mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh (Anjani & Restuti, 2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah keadilan pajak. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

Bekoui (2004) dalam penelitiannya terhadap 30 negara menghasilkan bahwa

keadilan dimata hukum dan berhubungan negatif dengan tingkat kriminalitas sebagai proksi moral. *Tax compliance* diartikan akurat dalam melaporkan pendapatan dan mengakui beban sesuai dengan hukum pajak. Dengan demikian, kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan pajak dapat diartikan sebagai tindakan ketidakpatuhan pajak. Terdapat dua pendekatan dalam memahami kepatuhan pajak : pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Pendekatan ekonomi *premised* dalam konsep ekonomi secara jelas, sedangkan pendekatan perilaku diukut dari kedisiplinan seperti aspek psikologi dan sosiologi (Noor, dkk, 2014).

Faktor keempat yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma (kewajiban) perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dalam Undang-Undang pajak disebutkan terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana adalah sanksi berupa hukuman fisik dan merupakan cara terakhir (benteng hukum) yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara yang dapat berupa: bunga, denda dan kenaikan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Penelitian terdahulu menganalisis dampak dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 dan bertujuan untuk menganalisis interaksi antara sikap,

norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Anjani & Restuti, 2016). Dengan mengambil sampel terhadap 103 orang wajib pajak orang pribadi pelaku usaha tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Salatiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat interaksi atau hubungan antara sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan; (2) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh; (3) norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh; (4) kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku patuh; (5) kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak; dan (6) niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terkait dengan itu, penelitian direplikasi lagi.

Dari latar belakang permasalahan yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya beragam, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta).**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;

2. Norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
3. Keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
5. Usia bisnis berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
6. Kompleksitas pelaporan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak;
7. Faktor-faktor non ekonomi seperti pendidikan, sumber pendapatan, keadilan dan *tax morale* memiliki dampak yang kuat terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak);
8. Tingkat kebebasan ekonomi, pasar ekuitas dan efektifitas hukum bisnis berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain dari identifikasi masalah tersebut diatas, faktor yang melatarbelakangi penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mengakibatkan perbedaan hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.3. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan pengetahuan dan waktu untuk melakukan penelitian terhadap seluruh variabel, penulis membatasi penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.

2. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Faktor yang diteliti sebagai variabel laten endogen adalah perilaku kepatuhan wajib pajak.
4. Faktor yang diteliti sebagai variabel laten eksogen adalah sikap wajib pajak, norma subyektif, keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan.

1.4. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diulas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah norma subyektif pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menguji secara empiris apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- b. Menguji secara empiris apakah norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- c. Menguji secara empiris apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- d. Menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku keputusan (*regulator*) untuk melakukan perbaikan yang menyangkut peraturan dan kebijakan perpajakan sehingga dapat memberikan stimulasi kepada Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak sehingga berdampak positif kepada penerimaan negara.

- b. Manfaat pengembangan ilmu

Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai apakah ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, norma subyektif dan keadilan sistem perpajakan serta

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi peneliti sejenis lainnya untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.